



## Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan)

Rita Purnama Sari<sup>1</sup>, Rice Haryati<sup>2</sup>, Dica Lady Silvera<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [ritapurnamasari0704@gmail.com](mailto:ritapurnamasari0704@gmail.com)

<sup>2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [rice.haryatii@gmail.com](mailto:rice.haryatii@gmail.com)

<sup>3</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [dicaladys@unespadang.ac.id](mailto:dicaladys@unespadang.ac.id)

Corresponding Author: Rita Purnama Sari

**Abstract:** *The purpose of this study was to determine the effect of the performance of local government apparatus and regional financial managers on the implementation of good governance for employees of the Koto XI Tarusan District. This type of research is quantitative. Data is processed using multiple linear regression using a questionnaire. The results showed that there was an influence between the performance of the local government apparatus (X1) on the implementation of good governance and there was an influence between regional financial managers (X2) on the implementation of good governance by employees of the Koto XI Tarusan District.*

**Keywords:** *Performance of Local Government Apparatuses, Regional Financial Managers, Good Implementation Governance.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelola keuangan daerah terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Data diolah dengan menggunakan *regresi linear berganda* dengan menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) terhadap penerapan *good governance* dan terdapat pengaruh antara pengelola keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan.

**Kata Kunci:** Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelola Keuangan Daerah, Penerapan *Good Governance*.

## PENDAHULUAN

Menurut (Sari, 2017) *Good Governance* merupakan sebuah struktur dalam berbangsa dan bernegara yang pola atas tingkah lakunya didasari oleh prinsip dan ciri tertentu. Sebuah Negara yang menerapkan *good governance* mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pada Negara tersebut dilandaskan dengan prinsip partisipasi, pemerintahan sebagaimana hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, efektivitas dan efisien, akuntabilitas, visi strategis dan saling berhubungan. (Bastian, 2010) mengemukakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning suatu organisasi*.

Kinerja aparatur pemerintah daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan pertanggung jawaban kinerja daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik

Otonomi daerah yang seluas-luasnya mulai dilaksanakan tahun 2001 membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan di daerah, termasuk reformasi pengelolaan keuangan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2006:27), paling tidak ada dua alasan mengapa reorientasi di bidang ini diperlukan, yaitu (1) pelimpahan wewenang dan urusan kepada daerah akan mengakibatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks, dan (2) tuntutan public akan pemerintah baik (*good governance*) memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, baik pada tahun tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggung jawaban.

Dalam penelitian (Yusniar, Darwanis, 2016) yang berjudul “pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern terhadap *good governance* dan dampaknya pada kualitas laporan keuangan (studi pada SKPA pemerintah aceh)” menyatakan jika masing-masing variabel yakni sistem akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern secara simultan ataupun persial dan variabel pengendalian intern serta *good governance* secara simultan ataupun persial sama-sama mempunyai dampak pada kualitas laporan keuangan.

Berikutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh (Wiwik lepag kristiana, made arie wahyuni, SE, Dr Edy Sujana, SE, Msi, 2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kinerja Organisasi dan Budaya Organisasi Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada LPD Se-Kecamatan Sukasada)” menunjukkan jika tiga variabel mencakup sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, dan budaya organisasi memberi pengaruh positif yang signifikan pada implementasi *Good Corporate Governance*. Kemudian variabel lainnya meliputi sistem pengendalian intern, kinerja organisasi, serta komitmen organisasi memberi pengaruh yang simultan pada implementasi *Good Corporate Governance*.

Penelitian oleh (Sigit prabawa, Herman Karamoy, 2020) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)” menggambarkan jika variabel

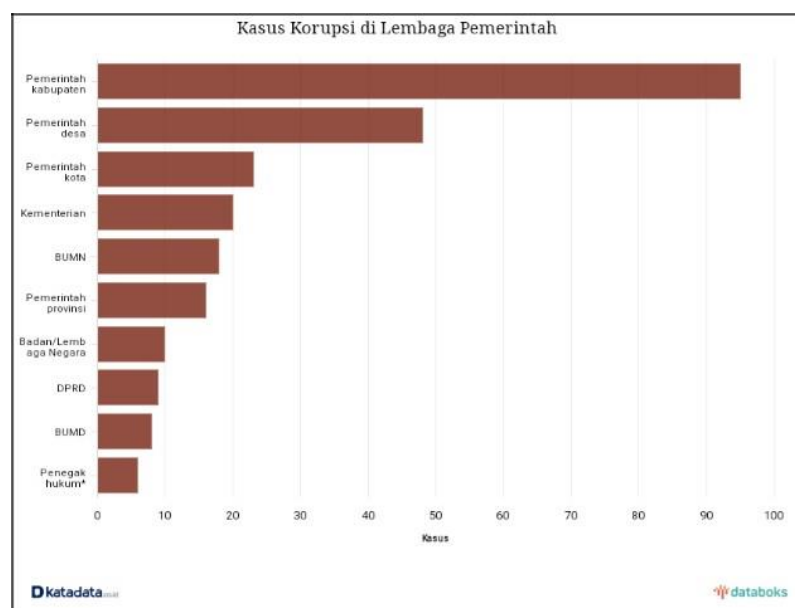
sistem pengendalian intern berdampak positif dan signifikan pada langkan merealisasikan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Minahasa, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak mempunyai dampak positif terhadap langkah merealisasikan *good governance* pada Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Penelitian oleh (Dhiyavani, 2017) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Impelentasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance*” hasilnya menjelaskan jika variabel kinerja aparatur pemerintah dan variabel implementasi standar akuntansi mempunyai dampak pada implementasi *good governance*, sedangkan variabel sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh pada implementasi *good governance*..

Bukti lemahnya penerapan *good governance* di Indonesia salah satunya aialah masih maraknya pejabat-pejabat yang menyalah gunakan wewenang sehingga banyak kasus korupsi yang terjadi. Dimana dilapangan masih juga ditemukan pelanggaran dan penyimpangan mengenai penggunaan dana nagari. ICW Merangkum adanya peningkatan kasus korupsi dalam pengelolaan anggaran desa yaitu ada sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai September 2017, dimana menetapkan sebanyak 101 kepala desa dan 6 perangkat desa yang terlibat ( [www.Detik](http://www.Detik) News 2017 )

Fenomena dalam penelitian ini yaitu terdapat adanya 3 nagari di kecamatan koto X1 Tarusan mengalami penurunan dana nagari seperti nagari taratak sungai lundang, nagari kampung baru Korong nan ampek dan nagari siguntur tua yang penurunannya cukup banyak dari 3 tahun terakhir ini. Berikut jumlah dana desa di 3 nagari pada tahun 2020-2022.

Pemerintah berupaya merealisasikan *Good Governance* yang tersendat sebab belum mencapai upaya yang maksimal dan masih banyaknya kasus korupsi di lembaga Negara. Mengutip dari databoks.katadata.co.id 18/02/2020 menurut laporan dari Indonesia corruption watch (ICW) yang telah mengelompokan 10 lembaga Negara dengan tingkat korupsi tertinggi di tahun 2019 pada grafik berikut:



Sumber : databoks.katadata.co.id 18/02/2020

**Gambar 1. 10 Lembaga Dengan Kasus Korupsi Terbanyak (2019)**

Berdasarkan data diatas pemerintah kabupaten adalah lembaga terbanyak dengan 95 temuan kasus korupsi. Lalu disusul oleh pemerintah desa dengan kasus kurang dari 50. Secara umum, kasus penggelapan uang yang terjadi di lembaga Negara Indonesia berhubungan dengan pelayanan public. Pelayanan public yang diselenggarakan pemerintah sepanjang waktu, kembali lagi pada tindakan yang tidak benar; menerima dan memberi suap. Sehingga, bagi Indonesia, untuk merealisasikan good governance adalah cita-cita yang sulit dan memerlukan kerjasama dari semua pihak.

Sebagai upaya pendorong penerapan *good governance*, ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan di dalam instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Faktor yang pertama adalah kinerja aparatur pemerintah atau manajemen penyelenggaraan pemerintah yang baik dan terkendali yaitu adanya manajemen yang adaptif, kondusif, dan reponsif. Maka, ciri dari *good governance* diharapkan bisa direalisasikan melalui langkah membangun kualitas manusia sebagai pelaku dari *good governance*. Untuk menjadikan atau menghasilkan manusia yang berkualitas dapat menempuh salah satu cara, yakni dengan mengokohkan sistem manajemen kinerja yang akan mendatangkan produktivitas agar terbentuk pemerintahan yang lebih baik (sedermayanti., 2012)

(Dhiyavani, 2017) menyatakan bahwa pencapaian kerja aparatur pemerintah daerah adalah tingkat kesuksesan dan kegagalan saat menyelenggarakan acara sebagaimana tugas dan fungsi pokok aparat yang mendeskripsikan kinerja atau tujuan yang dilandasi oleh visi, misi, dan rencana dari instansi pemerintah.

Menurut laporan kinerja kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi pada tahun 2018, pemerintah kabupaten/kota menduduki posisi paling bawah dalam target penerapan rencana strategis. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kabupaten/kota masih jauh dibawah indikasi tingkat keberhasilan dalam mewujudkan sasaran/ tujuan yang telah direncanakan..

Jefri Herbert Mailoor, Jullie J. Sondakh, Hendrik Gamaliel (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan *Good Governance* (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)” yang menunjukkan bahwa empat dari lima variabel yang mencakup variabel Sistem Akuntansi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, variabel peran APIP, dan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada implementasi *good governance*. Sedangkan satu variabel sisa menunjukkan pengaruh yang negatif pun tidak signifikan yakni variabel Budaya Organisasi.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Jefri Herbert Mailoor dkk, menunjukkan bahwa variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) memberi pengaruh pada implementasi *good governance*, sementara penelitian oleh Siti Indah Dhiyavani menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal tidak mempunyai pengaruh pada implementasi *good governance*. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Weni Nirmala Sari yang menunjukkan variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance*, sedangkan penelitian oleh Ghina Adhha Haura dkk menyatakan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *good governance*. Dari uraian tersebut dapat diketahui ada perbandingan hasil penelitian yang

bertolak belakang, yang mana pada penelitian Jefri Herbert Mailoor dkk menunjukkan hasil berpengaruh, sementara penelitian Siti Indah Dhiyavani menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Begitupun dengan variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada penelitian Siti Indah Dhiyavani menyatakan berpengaruh sedangkan penelitian Ghina Adhha Haura dkk menyatakan tidak berpengaruh. Maka dari itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian kembali terkait penerapan atau implementasi *good governance* dengan judul “Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerpana Good Governance (Studi Kasus Di Kecamatan Koto XI Tarusan)”

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah secara parsial terhadap penerapan *good governance*
2. Untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah secara parsial terhadap penerapan *good governance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan terhadap penerapan *good governance*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini saya lakukan di kantor kecamatan koto XI Tarusan kabupaten pesisir selatan. Dan sasaran utama penelitian ini yaitu seluruh pegawai perangkat camat yang ada di kecamatan koto XI Tarusan yang berjumlah 30 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menyebarkan kuisioner atau angket kepada setiap responden. Teknik kuisioner ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai variabel independen dan variabel dependen

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer. Menurut sugiyono (2018,hal 15) data kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi oleh angka. Data primer yaitu data diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk pernyataan secara terstruktur, sedangkan data sekunder adalah data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti tidak diperoleh langsung melainkan diperoleh dari pihak lain.

1. Hipotesis 1, diduga kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* (Y) Dari hasil penelitian diperoleh kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) dengan nilai thitung  $3,600 > ttabel\ 2,048$  , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan. Dimana semakin meningkat kinerja aparatur pemerintah maka akan meningkatkan penerapan *good governance*
2. Hipotesis 2, diduga pengelola keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* (Y) Dari hasil penelitian diperoleh pengelola keuangan daerah (X2) dengan nilai thitung  $3,276 > ttabel\ 2,048$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengelola keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto



XI Tarusan. Dimana semakin meningkat pengelolaan keuangan daerah maka akan meningkatkan penerapan *good governance*.

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 4.15 di atas diperoleh nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $35,933 > 4,18$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) dan pengelola keuangan daerah (X2) bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Y) pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah secara parsial terhadap penerapan *good governance***

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) terhadap penerapan *good governance* (Y) Diperoleh kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) dengan nilai  $t_{hitung} 3,600 > t_{tabel} 2,048$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap penerapan *good governance*. Dimana dengan menerapkan *good governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsive dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik pemerintahan yang baik. Karakteristik ini diharapkan akan diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh manan (2010) yang menyatakan bahwa ada isu sentral yang mencuat kepermukaan yaitu isu *good governance* dan muara dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terselenggaranya pemerintah yang *good governance*. *Good governance* akan menghasilkan birokrasi yang handal dan professional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap penerapan *good governance* dimana dengan menerapkan *good governance* diperlukan kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsf, dan adaptif sehingga akan menghasilkan karakteristik *good governance* karakteristik tersebut diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

Menurut tanjudin (2008) tentang konsep dan implikasi *good governance* di kabupaten Bangka, disini ditemukan beberapa factor yang mempengaruhi implementasi *good governance* salah satunya faktor manusia pelaksana yaitu aparatur pemerintah daerah. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan aparatur pemerintah yang baik dan handal yakni pemerintah yang kondusif, responsive dan adaptif. Keterkaitan yang diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar lebih berkinerja tinggi dan lebih produktif sebagai pelaku *good governance*.

### **Pengaruh pengelolaan keuangan daerah secara parsial terhadap penerapan *good governance*.**

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil terdapat pengaruh antara pengelola keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* (Y) Diperoleh pengelola keuangan daerah (X2) dengan nilai thitung  $3,276 > \text{ttabel } 2,048$ , berarti  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara pengelola keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan.

Hasil ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* pegawai di kecamatan koto XI tarusan dimana pimpinan atau pegawai selalu terlibat bersama-sama dalam mengevaluasi hasil suatu program/kegiatan/proyek setiap program kerja yang dilaksanakan dan dikelola secara efektif sesuai target yang direncanakan APD dan juga rutin mengevaluasi kegiatan atau program APD yang telah dianggarkan dengan yang telah dicapai sehingga akan menciptakan *good governance* yang baik. Seperti pengelolaan keuangan dilakukan secara ekonomis agar terhindar dari pemborosan dan tidak produktif, memiliki visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategis organisasi dan kegiatan sebagai upaya penyempurnakan rancangan rencana kerja yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan.

Menurut Arso (2012) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sambungan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi/SKPD dapat terlihat.

Hubungan sistem pengelolaan keuangan untuk menciptakan *good governance* dilihat pada perspektif sistem dan pengakuan akuntansi dan anggaran daerah melalui tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yaitu masing-masing tahap meliputi input, proses dan output yang sudah ditetapkan dan kemudian dilaksanakan menggunakan sistem akuntansi yang sudah disesuaikan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif baik berupa laporan triwulan maupun laporan tahunan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada daerah. Tahap pengendalian inputnya berupa laporan pelaksanaan APBD kemudian diproses sebagai dasar evaluasi terhadap laporan tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai penilaian pertanggung jawaban kepala daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan terhadap laporan pertanggung jawaban kepala daerah.

### **Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara simultan terhadap penerapan *good governance***

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil nilai Fhitung  $> F_{\text{tabel}}$  yaitu  $35,933 > 4,18$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) dan pengelola keuangan daerah (X2) bersama-sama berpengaruh terhadap penerapan *good governance* (Y) pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan.

Diperoleh Adjusted R square 0,700 artinya sebanyak 70,0% variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelola keuangan daerah mempengaruhi penerapan *good governance* dan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian

Dengan menerapkan *good governance* diperlukan adanya kinerja aparatur pemerintah daerah yang baik, kondusif, responsive, dan adaptif sehingga menghasilkan karakteristik *good governance* dan untuk mendapatkan pengelolaan keuangan yang baik di perlukan tahap-tahap perencanaannya terlebih dahulu agar dapat di proses sebagai dasar penilaian pertanggung jawaban kepala daerah yang outputnya berupa keputusan hasil evaluasi maupun penerimaan atau penolakan laporan. Kinerja aparatur pemerintah daerah juga diharapkan dapat membantu instansi-instansi pemerintah dalam menciptakan kinerja-kinerja yang baik dan berpotensi. Jika kinerja aparatur pemerintah daerah semakin baik maka kinerja tersebut juga dapat mendukung tat pengelola pemerintahan yang baik (Good governance)

Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Ruspina, 2013) yaitu kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan *good governance* dan suatu instansi/organisasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan prinsip *good governance* apabila pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku dan menghasilkan (dari tahap perencanaan hingga pelaporan) pelaporan keuangan daerah yang handal dan relevan. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan merupakan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Arso, 2012 dalam Ruspina, 2013). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah akan memberikan penilaian berupa sajian laporan keuangan untuk menjadi faktor kunci dalam penerapan *good governance*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) dan pengelola keuangan daerah (X2) terhadap penerapan *good governance* (Y) pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial kinerja aparatur pemerintah daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan. Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,577 dengan thitung 3,600 > ttabel 2,048 dan nilai (sig 0,001 < 0,05).
2. Secara parsial pengelola keuangan daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan. Hal ini diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0,935 dengan thitung 3,276 > ttabel 2,048 dan nilai (sig 0,003 < 0,05).
3. Secara simultan kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good governance* pegawai Kecamatan Koto XI Tarusan dengan nilai Fhitung > Ftabel yaitu 35,933 > 4,18 dan nilai sig 0,000 < 0,05.

## REFERENSI

- Agussalim Manguluang. (2017). *Statistik*. Ekasakti Press.
- Amijaya, G. . (2016). *Mengukur dan Meningkatkan loyalitas Konsumen*. Alfabeta.
- Budisetyowati, D. A. (2017). *Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta.



- Dhiyavani, S. I. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, dan Implementasi Standar Akutansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance. *Jom Fekon Vol .4 No 1*.
- Ghina adha haura,tuti meutia, afrah junita. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Good Governance Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPK di Kota Langsa). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*.
- Ghozali, imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM Spss 21 update PLS regresi*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 23 (Edisi8). cetakan ke VIII*. badan penerbit universitas diponegoro.
- Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko. (2015). Key Succes Faktor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah(Survei Pada Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- Harahap, A. S. (2019). Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Melalui Sipaingot Pada Masyarakat Adat Dalihan Natolu. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*.
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : suatu sarana good governance. *Akuntansi Pemerintah*.
- Maryam, N. siti. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI No.1*.
- Nagor, T. F. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat (Studi pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat). *Junal Magister Akuntansi*.
- Sari, W. N. (2017). Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah,pengelolaan keuangan daerah,sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dan komitmen organisasi terhadap penerapan good governanca. *Ekonomi*.
- Sedermayanti. (2012). *manajemen dan komponen terkait lainnya*. refika aditama.
- Sigit prabawa,Herman Karamoy, lidia mawikere. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris di Kabupaten Minahas). *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kuantitatif,dan R&D*. Alfabeta,CV.
- Sujarweni, W. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Suryo dan Jatmiko. (2017). *Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah*. Kampus Terpadu UMY.
- Syafrion, F. Y. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi Dan Budaya Terhadap Penerapan Good Governance (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kota solok). *Akuntansi*.
- Varesvera, F. astria. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas sosial Provinsi jawa barat). *Jurnal Manajemen*.
- Wiwik lepong kristiana,made arie wahyuni,SE,Dr Edy Sujana,SE,Msi, A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern,Kinerja Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap

- Penerapan Good Governance (Studi Kasus Pada LPD Se- Kecamatan Sukasada). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Wuri, R. R. (2017). Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Eksekutif*.
- Yusniar, Darwanis, S. A. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh). *Jurnal Administrasi Akuntansi*.
- Yusniar. (2016). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Melalui Motivasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*.